

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN ELEKTRONIK GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Oleh :

Khoirul Anwar, Titik Djumiarti, Rihandoyo

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The use of information and communication technologies very important in the globalization area. Based on the presidential intruction No. 3 of 2003 on local governments to take advantage of information technology white the avilable resources with in thegovernmental activities, including the district of jepara. The use of IT will give birth to an electronic-based system of government (e-Government). The successful implementation of e-Government is very influentialon the efficiency, effectiveness, seen from the successful elements of the Harvard JFK School of Government are Support, Capacity and Value.

This research aims to determine the implementation of e-Government of Jepara and determie the factors that drive and inhibit. Attempt to answer the problems and research objective successfully done white parliaments of Harvard JFK School of Government. Methodology used in this research is qualitative diskripsif.

Successful of implementation of the elements of e-Government in Jepara, are; website creation www.jeparakab.go.id, the increasing of infrastructure development the private sectors and do learning improvement one-Government. The success rate of implementation of e-Government in Jepara regencyin on their level of maturation.

In the development of e-Government it is necessary to support program of e-Government, the need for cooperation on increase the budget, the need for socialization of the exstence of e-Government directly from the government and the use of information tecnology.

Keywords: e-Government, Implementation, Success rate

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inisiatif *e-Government* di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 Tanggal. 24 April 2001, tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, *e-Government* wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology/ICT*) menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, Seiring dengan hal tersebut, saat ini mulai tumbuh dengan apa yang disebut *electronic government* (*e-Government*). Dengan harapan pemerintah kota maupun daerah dapat memanfaatkan atau menggunakan (Telekomunikasi, Media dan Informatika) teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi.

Electronic Government menjadi salah satu isu-isu pembangunan jangka panjang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2007-2012 pada Kabupaten Jepara diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007. adapun isu pembangunan tersebut adalah :

1. Masih terbatasnya akses informasi publik terhadap

kegiatan dan kinerja pemerintahan daerah.

2. Terbatasnya jaringan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi internal dan eksternal pemerintah daerah.
3. Masih terbatasnya kapasitas SDM yang membidangi dan menjalankan urusan komunikasi dan informasi

Terkait dengan masih kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sumberdaya manusia yang memahami *e-Government*, kurangnya arus Informasi, kurangnya sosialisasi pemerintah, serta kurangnya partisipasi masyarakat dan terbatasnya sarana prasarana untuk melaksanakan program-program dalam mencapai arah kebijakan pengembangan (*G-to-C, G-to-B, G-to-G, G-to-E*). Selain itu, terdapat masalah lain yaitu kurangnya komitinya para pengelola jaringan dalam membangun program-program yang akan diterapkan dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui permasalahan tersebut, maka peneliti memfokuskan permasalahan dan membuat penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Keberhasilan *Electronic Government* Pada Pemerintah Kabupaten Jepara**”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mendorong dan menghambat penerapan *e-Government* di Pemerintah Kabupaten Jepara ?

C. TUJUAN

Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menjadipenghambat dan pendorong penerapan *e-Goverment* pada Pemerintah Kabupaten Jepara.

D. KERANGKA TEORI

D1. Tingkat Keberhasilan E-gov

Tingkatan kesuksesan penerapan *e-Government* dapat dikelompokkan menjadi 4 Tingkatan besar: Panduan Penyelenggaraan situs Pemerintah Daerah, (Depkominfo, 2003)

a. Tingkat Persiapan, antara lain:

1. Pembuatan situs web pemerintah
2. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan *e-Government*;
3. penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk *Multipurpose Community Center* (MCC), Warung dan kios Internet, dan lain-lain;
4. sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk publik maupun penggunaan internal;
5. pengembangan motivasi kepemimpinan (*e-leadership*) dan kesadaran akan pentingnya manfaat *e-Government* (*awareness building*);

b. Tingkat Pematangan, antara lain:

1. pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, antara lain dengan menambahkan fasilitas mesin pencari (*search engine*), fasilitas tanya jawab dan lain-lain;
2. pembuatan hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya (*hyperlink*).

c. Tingkat Pemanfaatan, antara lain:

1. Penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik antara lain dengan menambahkan fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran dan lain-lain;
2. penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain (*interoperabilitas*).

d. Tingkat Pemanfaatan, antara lain:

1. pembuatan berbagai aplikasi

untuk pelayanan G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Bussines*

2. G2C (*Government to Community*) yang terintegrasi; pengembangan proses layanan *e-Government* yang efektif dan efisien;
3. penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (*best practice*).

D2. Elemen Sukses E-gov

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* dikutip oleh (Indrajit, 2002:15-18), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah:

1. Support

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-Government*.

Tanpa adanya unsur "*political will*" ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-Government* dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen "*topdown*", maka jelas dukungan implementasi program *e-Government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembatunya – Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang

diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut:

Disepakatinya kerangka *e-Government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan;

Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral;

Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-Government* (seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus – misalnya kantor *e-Envoy* – sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain sebagainya); dan

- a) Disosialisasikannya konsep *e-Government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik.

2. *Capacity*

Elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *e-Government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

- a) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial;

- b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-Government*; dan

- c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

3. *Value*

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (*supply side*). Berbagai inisiatif *e-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*). Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-Government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep *e-Government*.

E. METODE

Desain penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana penelitian lebih menekankan pada suatu analisis dan sekaligus penggambaran tentang suatu kondisi realitas yang ada sehingga

hasil dari penelitian tersebut adalah banyak menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/ tidak tertulis dari pelaku-pelaku yang diamati.

Situs penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jepara, difokuskan pada website www.jeparakab.go.id yang dikelola oleh Dinas Hubkominfo Jepara.

Informan penelitian

Informan yang dipilih yaitu Kepala Kabid Kominfo, Kasi Pengembangan telekomunikasi dan informasi dan Kasi Telekomunikasi dan Telematika. Serta masyarakat dan stakeholders.

Jenis data

Penelitian kualitatif menggunakan data berupa: teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol yang menggambarkan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.

Sumber data

Data primer data diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan. Dan Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data

Menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data

Analisis data yang dipakai adalah Analisis Triangulasi menguji keabsahan data penelitian dengan membandingkan data observasi, wawancara, website, buku dan lain-lain.

PENYAJIAN DATA

A. HASIL PENELITIAN

Aplikasi elemen sukses pendukung *e-Government*. Menurut hasil kajian dan riset *Harvard JFK School of Government*. Adapun beberapa elemen sukses pendukung *e-Government* tersebut yang lain: *support, capacity, dan value*.

1. Support :

A. Political Will Kabupaten Jepara telah mengeluarkan SK Bupati mengenai pembuatan *website* www.jeparakab.go.id. Hal ini Sesuai dengan pernyataan Kabid Kominfo Jepara. Awal penerapan *e-Government* pada Kabupaten Jepara didasarkan pada Inpres Nomer 03 Tahun 2003 dan Permen Kominfo Nomor: 28/Per/M.Kominfo/9/2006. Kemudian diimplementasikan oleh Kabupaten Jepara dengan dikeluarkannya SK Bupati Jepara NO 550/184 Tahun 2013 mengenai Sub Nama Domain *website*, www.jeparakab.go.id.

Kasi Pos Telekomunikasi dan Telematika juga menyatakan; Program-program *e-Government* Kabupaten Jepara ditetapkan dalam RPJM serta adanya dukungan mengenai SK Bupati Jepara NO.550/185 Mengenai penggunaan *e-mail* resmi Kabupaten Jepara. Ini digunakan untuk mendistribusikan dokumen resmi kedinasan dilingkungan pemerintah Kabupaten Jepara yang berbasis teknologi.

B. Infrastruktur

Sesuai dengan pernyataan Kasi Pos Telekomunikasi dan Telematika Jepara. Pada tanggal 13 juni 2008 Bupati Jepara Drs. Hendro Martojo, SE.MM telah meresmikan tower pemancar wireless pada pusat kota yaitu di pendopo. Pada tahun 2009-2010 membangun pemancar di 16 kecamatan dan 11 kelurahan di Jepara. Pada tahun 2011-2012 melakukan pengadaan aplikasi pendukung pengembang *website* resmi dan *website* SKPD. Namun ada beberapa kendala yang disampaikan oleh Kabid Kominfo, adanya tower yang ambruk dan adanya software pemutus jaringan yang digunakan masyarakat.

C. Media Sosialisasi

Media sosialisasi yang digunakan menurut Kasi Pengembangan Kominfo Jepara, Adanya *e-Government*

(www.jepara.go.id) ini dipublikasi oleh Dishubkominfo Kabupaten Jepara yaitu dengan berbagai macam media elektronik, spanduk, surat kabar, dan majalah SKPD (gelora) dan semua website SKPD yang ada di Jepara untuk memperkenalkan web jeparakab.go.id kepada masyarakat melalui dunia maya dan dipublikasikan oleh Dishubkominfo Jepara. Belum adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat secara langsung.

2. *Capacity* :

a. Sumber Daya Manusia

Menurut pernyataan Kasi Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika Jepara, Pada setiap SKPD di Jepara telah ada pegawai atau pengelola untuk mengurus web atau memberikan informasi kepada masyarakat. Pegawai pengelola website dibekali dengan tingkat pendidikan D3 dan S1 serta terdapat juga pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola website yang diadakan pada 1 bulan sekali pada Dinas Hubkominfo Jepara. Kendala yang ada belum adanya pelatihan serta program-program pendukung untuk meningkatkan kemampuan masyarakat.

B. Sumber daya Finansial

Menurut Kasi Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika Jepara dan Kabid Kominfo. Anggaran hanya berasal dari APBD yang sudah ditetapkan dalam RPJM dan disusun oleh Bappeda. Nilai anggaran yang dikeluarkan sebesar 75 juta pertahunnya dan digunakan untuk keperluan, jasa pengembangan web sejumlah 55 web SKPD dan 1 web Resmi Jepara. Anggaran mau tidak mau tersebut harus mencukupi karena anggaran hanya berasal dari APBD saja dan belum adanya hibah dana dari pihak swasta.

3. *Value* :

a. Pemerintah

Menurut Kabid Kominfo dan Kasi Kominfo manfaat yang telah dirasakan saat ini setelah adanya *e-Government* adalah; *e-Government* adalah menciptakan layanan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi dan sumberdaya dan bisa diartikan sebagai alternatif pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Tujuan *e-Government* diterapkan untuk masyarakat adalah sebagai sarana berkomunikasi melalui media elektronik, memberikan layanan informasi berbasis website, menikmati layanan internet gratis, menyediakan alternatif pelayanan berbasis elektronik, dan transparansi kepada masyarakat. pengiriman laporan penting kedinasan, mempermudah komunikasi antar SKPD, meningkatkan transparansi kepada masyarakat dll.

b. Masyarakat

Adapun beberapa manfaat yang di ungkapkan oleh masyarakat antara lain ; Bapak edy dan Abdul mengetahui informasi tentang Persijap dan akses internet di kecamatan bangsr. Menurut bapak fai dan ibu muna, mengetahui informasi lowongan kerja dan sebagai sarana berkomunikasi dengan pemerintah.

ANALISIS

Analisi factor-faktor keberhasilan e-government Jepara

4 tingkatan keberhasilan menurut (Depkominfo, 2003) 1. Persiapan 2. Pematangan 3. Pemantapan.

Menuru tobservasi yang telah dilaksanakan dari beberapa fenomena yang adamaka proses penyelenggraan *e-Government* pada Kabupaten Jepara berada pada tahapan ke-2. Yaitu pada tahap pematangan, hal tersebut dibuktikan melalui adanya layanan publik interaktif, tanya jawab dan

penghubung antara situs resmi dengan situs lembaga lain.

Unsur-unsur pada tahap persiapan dan pematangan telah dipenuhi oleh Kabupaten Jepara. Pada tingkat persiapan pemerintah harus memiliki situs web resmi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Jepara telah mempunyai *website* resmi Kabupaten Jepara yaitu www.jeparakab.go.id dan situs resmi lembaga-lembaga pemerintah, antara lain: <http://dkk.jeparakab.go.id/>, <http://arsipda.jeparakab.go.id/>, <http://dishubkominfo.jeparakab.go.id/> dan lain-lain.

Unsur ke-1 yang telah diterapkan pada pemerintah Kabupaten Jepara yaitu pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan *e-Government*. Pada pemerintah Kabupaten Jepara setiap bulan mengadakan pelatihan kepada para pegawai atau pengelola *website* SKPD, pegawai yang dilatih adalah pegawai yang bertugas mengelola informasi elektronik berbasis web. Pelatihan pegawai pada kantor Dinas Hubkominfo, ruangan LPSE .

Unsur lain yang telah dipenuhi oleh Kabupaten Jepara adalah menyediakan sarana akses publik dalam bentuk tower jaringan, modem, *router*, *hotspot area* dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Jepara telah memberikan pelayanan penyediaan sarana akses publik yaitu menyediakan *hotspot area* 24 jam yang berpusat Jalan kartini No.1 titik askes tersebut berada pada pusat kota dan terletak disekitar pusat pemerintahan Kabupaten Jepara. Pemerintah Kabupaten Jepara juga telah membangun akses jaringan internet di semua SKPD Kabupaten Jepara.

Sosialisasi juga merupakan salah satu unsure yang dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Jepara dalam menerapkan *e-Government*. Sosialisasi

adanya *website* resmi www.jeparakab.go.id dilakukan oleh Dishubkominfo Kabupaten Jepara. Sosialisasi dilakukan dengan membuat *website* itu sendiri. Selain itu, sosialisasi dilakukan melalui majalah antra SKPD yaitu majalah Gelora dan Radio Kartini FM. Pemasangan spanduk di tempat-tempat yang strategis. Sosialisasi cara ini dilakukan agar banyak masyarakat yang melihat, mengakses *website* yang telah disediakan dan mengetahui adanya *e-Government* pada Kabupaten Jepara.

Pengembangan *e-Government* harus mempunyai komitmen dari pemimpin, Pemimpin harus memberikan motivasi dalam mengimplementasikan *e-Government*. Pada Pemerintah Kabupaten Jepara telah membuktikan keseriusannya dalam hal mengembangkan aplikasi pendukung *website* dan pengadaan infrastruktur yang semakin tahun semakin meningkat. Bukti keseriusan lainnya, dengan dikeluarkannya SK Bupati No 550/184 Tahun 2013 Mengenai Sub Nama Domain, Jepara.go.id Untuk Menjadikan Situs Resmi Kabupaten Jepara.

Persiapan paraturan pendukung terlaksanan *e-Government* merupakan salah satu unsur dalam tingkatan Persiapan. Pada pemerintah Kabupaten Jepara telah disiapkan peraturan dalam pengembangan *e-Government*. Dengan dikeluarkannya SK Bupati Jepara No 550/185 mengenai penggunaan *e-mail* resmi Kabupaten Jepara, digunakan untuk mendistribusikan dokumen resmi kedinasan.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Jepara juga telah mempunyai fasilitas yang terdapat pada tingkat yang ke-2, yaitu tingkat pematangan. Pada tingkatan yang ke-2 ini terdapat dua unsur yaitu pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, antara lain

dengan menambahkan fasilitas mesin pencari (*search engine*), fasilitas tanya-jawab (*chatting, e-mail*) dan lain-lain, pembuatan hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya.

Unsur pada tingkat pematangan yaitu adanya penghubung antara situs resmi dengan situs SKPD Kabupaten Jepara yang telah diterapkan dan ditampilkan dalam konten sub domain dan instansi lain. Instansi-instansi yang ada pada konten sub domain dalam dinas/instansi yang terdapat pada Kabupaten Jepara. Hal ini mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Adapun instansi yang terkoneksi antara lain Dinas Bina Karya, Kesehatan, Pariwisata, dan Badan Bakesbangpol, BKD, Bappeda dan lain-lain. Sehingga akses ke *websiteresmi* Kabupaten Jepara bisa mengetahui dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi pemerintahan atau informasi yang diperlukan.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Jepara juga telah memasuki pada tingkatan ke-3 yaitu tingkat pematangan. Adanya transaksi elektronik menggunakan media *e-mail* sebagai sarana pengiriman atau mendistribusikan dokumen resmi ke dinas. Namun penggunaan transaksi menggunakan media *e-mail* belum sepenuhnya diterapkan dan berjalan karena masih dalam tahap mensosialisasikan.

Menurut observasi, Pemerintah Kabupaten Jepara telah memasuki tingkat yang ke-2, tingkat pematangan yaitu dengan tersedianya unsur-unsur yang telah dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara telah berada pada tingkatan yang ke-2 yaitu Tingkat Pematangan.

Faktor Penghambat

- a. Terbatasnya alokasi anggaran
- b. SDM masyarakat pengguna internet masih rendah
- c. Peraturan pendukung masih sangat kurang
- d. Pengelolaan website masih rendah

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. *Support* merupakan elemen utama dalam pelaksanaan *e-Government*, dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor kunci. Sehingga komitmen dari pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah Kabupaten Jepara sendiri mempunyai komitmen untuk menerapkan *e-Government* di Kabupaten Jepara. Infrastruktur penerapan *e-Government* pada Kabupaten Jepara cukup memadai dalam melaksanakan pemerintah yang berbasis teknologi elektronik yang dikelola oleh lembaga Dishubkominfo Jepara. Media Sosialisasi merupakan salah satu alat pendukung terlaksananya *e-Government*. Karena pemerintah Jepara perlu mensosialisasikan adanya *e-Government*, ini agar masyarakat mengetahui dan menikmati pelayanan informasi yang diberikan atau disampaikan oleh pemerintah.
2. *Capacity* kemampuan pemerintah untuk menerapkan *e-Government* merupakan unsur penting kemampuan manusia terutama pegawai/server yang mengelola *website* untuk melayani publik perlu diperhatikan. Pada Pemerintah Kabupaten Jepara mempunyai tenaga terdidik untuk memanfaatkan teknologi informasi. Kemampuan masyarakat dalam menggunakan internet dan

komputer masih sangat rendah ini disebabkan karena latar belakang pendidikan dan profesi kerja yang tidak mendukung. Namun ada juga masyarakat yang memanfaatkan *e-Government* sebagai media informasi, akses internet, mencari berita, dan sarana komunikasi dengan pemerintah. Selain kemampuan manusia kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran guna penerapan *e-Government* juga perlu disiapkan. Pada Pemerintah Kabupaten Jepara terdapat anggaran APBD yang digunakan untuk pengembangan dan perawatan sarana pendukung *e-Government*. Anggaran yang disediakan pemerintah masih sangat kecil dan cenderung defisit karena belum adanya hibah dan dari pihak swasta.

3. *Value* Penerapan *e-Government* harus memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Manfaat yang telah diperoleh pemerintah dalam penerapan *e-Government* adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat, sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat, mempermudah berkomunikasi atau interaksi antar SKPD dan lain-lain. Dalam penerapane-*Government*, masyarakat memperoleh manfaat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih baik, cepat, dan dapat mengakses informasi dengan mudah. Masyarakat juga menjadi salah satu elemen keberhasilan *e-Government*

4. REKOMENDASI

1. **Perlunya peraturan pendukung *e-Government***

Membuat peraturan yang berkaitan dengan tata

pengelolaane-*Government* dan peraturan mengenai konsistensi pengelola *website* SKPD, dengan harapan pengelolaan lebih tepat sasaran dan terorganisir.

2. **Meningkatkan sumber daya manusia masyarakat**

Diperlukan adanya pelatihan-pelatihan mengenai penggunaan komputer dan internet padakalangan masyarakat yang kurang mampu dan berpendidikan rendah. dengan cara membuat program pelatihan-pelatihan komputer.

3. **Meningkatkan Anggaran *e-Government***

Diperlukan kerjasama dengan pihak swasta untuk membuat program-program pelayanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, dengan cara membuat program pelayanan masyarakat dan melibatkan masyarakat.

4. **Pelunya Sosialisasi *e-Government* kepada masyarakat secara langsung**

Membuat program-program mengenai sosialisasi *e-Government* sehingga masyarakat mengetahui dan mampu memanfaatkan *e-Government*.

5. **Update *website***

Perlunya *update* berita maupun informasi, sehingga masyarakat mengetahui informasi terbaru dengan harapan masyarakat meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai adanya *e-Government*.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, Nico. 2007.
Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government.
Malang: Penerbit Bayumedia.

Indrajit, RichardusEko, 2002.

Electronic Government, Penerbit
Andi: Yogyakarta.

Indrajid, RichardusEko. 2001.
*Electronic Government, Strategi
Pembangunan dan
Pengembangan Sistem
Pelayanan Publik Berbasis
Teknologi Digital*. Yogyakarta:
Penerbit Andy.

Ibrahim, Amin. 2007.
*Pokok-Pokok Administrasi
Publikdan Implementasinya*
Bandung: Penerbit Refika
Aditama.

J. Moelong, Lexy. 2008.
*Metode Penelitian Kualitatif
Edisi Revisi*. Bandung: Remaja
Rosda karya Offset.

Nawawi, Hadari.1995.
Metodologi Penelitian Sosial.
Yogyakarta: Gajah Mada Press.

Sutanta, Edhy. 2003.
Sistem Informasi Manajemen.
Yogyakarta: Graha Ilmu